



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEP. KESEHATAN, DEP. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BKKBN,
BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: I
Jenis	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan RI
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 9 November 2009
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: 1. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dengan Pasangan Kerja; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas Departemen Kesehatan RI; 3. Lain-lain.
Anggota yang hadir	: Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 10.15 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum. Sebelum memulai pokok-pokok pembicaraan Ketua Rapat memperkenalkan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Setelah memperkenalkan seluruh jajaran Eselon I Departemen Kesehatan RI, Menteri Kesehatan RI menyampaikan paparan tentang program kerja 100 hari Menkes; masalah aktual bidang kesehatan terdiri dari perkembangan pelaksanaan Jamkesmas; penanggulangan korban gempa bumi di Jawa Barat dan Sumatera Barat, penyelenggaraan kesehatan haji dan penanggulangan penyakit menular.
2. Lima isu pokok program Departemen Kesehatan RI, berkaitan dengan program 100 hari Menteri Kesehatan, terdiri dari :

- (1) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat;
 - (2) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs;
 - (3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;
 - (4) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas Nakes terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) secara berkesinambungan;
 - (5) Dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Pelaksanaan Jamkesmas 2009 merupakan kelanjutan pelaksanaan tahun 2008 dengan perbaikan dan peningkatan yang mencakup aspek kepersertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan dan organisasi manajemen. Sedangkan sasaran kepesertaan Jamkesmas 2009 tetap mencakup 76,4 juta jiwa dan Pemda harus berkontribusi terhadap masyarakat miskin di luar kuota. Melalui Jamkesmas diharapkan dapat mendorong peningkatan umur harapan hidup bangsa Indonesia, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran, disamping itu dapat terlayannya kasus-kasus kesehatan masyarakat peserta Jamkesmas.
 4. Dalam penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2009, Departemen Kesehatan RI telah melakukan upaya : persiapan; perekrutan petugas kesehatan; pelatihan petugas kesehatan; penyiapan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan; pemberangkatan petugas kesehatan; pelayanan kesehatan di Arab Saudi; pelayanan kesehatan di embarkasi/debarkasi haji; serta melakukan monitoring dan evaluasi.
 5. Kesehatan masyarakat dalam 5 tahun ke depan agar lebih baik sehingga dengan manusia Indonesia yang sehat, bangsa Indonesia dapat membangun. Program kesehatan tahun-tahun selanjutnya agar lebih ditingkatkan sehingga kesehatan masyarakat Indonesia tidak berada di bawah Negara Srilanka. Reformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah agar dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Perlu peran semua pihak termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan nasional.
 6. Program 100 hari Menteri Kesehatan dirasakan belum melibatkan peran serta masyarakat, agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka harus mengikutsertakan masyarakat dan disusun berdasarkan skala prioritas, Departemen Kesehatan harus mempunyai program yang menjadi perhatian utama tahun 2010-2014 untuk meningkatkan kesehatan masyarakat guna mencapai target MDGs tahun 2015.
 7. Lembaga atau badan nasional maupun internasional membuat data kesehatan mengenai Jamkesmas, kematian ibu dan anak, dan lain-lain yang hasilnya berbeda-beda. Oleh karena itu diusulkan agar Depkes melakukan pendataan ulang dengan bekerja sama dengan lembaga independen.
 8. Program Jamkesmas, dirasakan masih belum menyentuh masyarakat miskin yang sebenarnya dan pelaksanaannya melanggar UU Nomor 40 Tahun 2004. Oleh karena itu diharapkan Depkes merubah pola pelaksanaan Jamkesmas ke depan dan segera bersama-sama dengan Komisi IX DPR RI memprioritaskan pengusulan RUU BPJSN.
 9. Berkaitan dengan telah disahkannya Undang-undang tentang Kesehatan dan Undang-undang tentang Rumah Sakit, maka untuk pelaksanaan Undang-undang tersebut diharapkan Depkes segera menyiapkan peraturan-peraturan pendukungnya.
 10. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan bagi masyarakat, diharapkan Depkes melakukan revitalisasi terhadap fungsi Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan secara komprehensif, selain itu juga terhadap Posyandu dan Desa Siaga.
 11. Diusulkan kesehatan jiwa masuk ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan anggaran untuk kesehatan jiwa agar ditingkatkan.

12. Agar tidak terjadi generalisasi dan penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan, yang mengakibatkan alat tersebut tidak dapat dipakai karena tidak sesuai dengan kebutuhan, maka diharapkan Depkes segera menertibkan pengadaan dan distribusinya.
13. Untuk pemerataan penyebaran tenaga kesehatan di daerah-daerah khususnya untuk dokter spesialis, diusulkan agar Depkes melakukan terobosan dimana dokter yang berasal dari putra-putri daerah diberi kesempatan dan dipermudah mengikuti program pendidikan dokter spesialis.
14. Untuk pelaksanaan program-programnya Depkes tentunya sangat tergantung pada anggaran yang mendukungnya, oleh sebab itu diharapkan agar Depkes mengidentifikasi kebutuhan anggarannya secara lebih terinci dan juga memaksimalkan penyerapan anggarannya.

III. CATATAN PENTING

Rapat Kerja hari ini diskors pada pukul 15.45 WIB dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 10 November 2009 pukul 10.00 WIB, karena Menteri Kesehatan akan melaksanakan koordinasi dengan seluruh Eselon I Departemen Kesehatan.

Rapat diskors pukul 15.45 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING